



Subsidi dan Inflasi Dalam Ketidakpastian Global : Implikasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia

Wira Yudha Alam^{1*}, Aisyah Rahmah Maulidiyah², Gisca Dwi Larasati³, Halimatus Sadiyah⁴

¹⁻⁴ Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Dukuh Menanggal XII, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234

Korespondensi penulis: wirayudhaalam@unipasby.ac.id

Abstract : *The year 2024 presents a crucial phase for Indonesia's economy during the global post-pandemic recovery and ongoing geopolitical uncertainty. This study aims to examine the relationship between subsidy policy and inflation levels on the purchasing power of Indonesian households. An explanatory quantitative method is applied using secondary data sourced from institutions such as BPS, the Ministry of Finance, and the Ministry of Manpower. The results reveal that despite a reported inflation decrease to 1.57% in early 2024, this reduction was largely driven by food price interventions rather than an improvement in consumer purchasing behavior. Household purchasing power remains under strain due to the persistent gap between rising basic commodity prices and stagnant income levels. Meanwhile, the implementation of subsidies and social assistance has not been fully effective, facing challenges in targeting accuracy and distribution efficiency. Policy reform is needed to shift subsidies from being merely protective to becoming instruments of empowerment. This includes expanding access to training, financing, and inclusive job opportunities for low-income groups. In addition, improving social welfare data systems, accelerating digital integration, and diversifying growth through industrial, export, and digital sectors are crucial for building a resilient and inclusive economy. The study recommends a coordinated approach combining short-term interventions with long-term structural reforms.*

Keywords: *Inflation, Purchasing Power, Subsidy.*

Abstrak: Tahun 2024 menjadi periode krusial bagi perekonomian Indonesia, di tengah pemulihan global pasca pandemi dan gejolak geopolitik dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kebijakan subsidi dan tingkat inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan analisis data sekunder dari BPS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun inflasi menurun hingga 1,57% pada awal 2024, penurunan tersebut tidak disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat, melainkan oleh stabilisasi harga pangan. Daya beli masyarakat tetap tertekan akibat ketidakseimbangan antara harga kebutuhan pokok dan pertumbuhan pendapatan. Subsidi dan bantuan sosial yang diterapkan pemerintah belum sepenuhnya efektif karena kendala ketepatan sasaran dan keterbatasan data. Reformasi kebijakan subsidi perlu diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan melalui akses pelatihan, pembiayaan, dan kesempatan kerja. Perbaikan data sosial, digitalisasi distribusi bantuan, dan diversifikasi sektor ekonomi menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Inflasi, Daya Beli, Subsidi.

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia akan menghadapi banyak tantangan pada tahun 2024. Indonesia menghadapi tantangan yang sulit dalam menjaga stabilitas ekonominya di tengah kondisi global yang masih dibayangi oleh fluktuasi harga komoditas, konflik geopolitik, dan ketidakpastian pasca-pandemi. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan tiga aspek penting sekaligus— pengendalian inflasi, keberlanjutan subsidi, dan perlindungan daya beli masyarakat—adalah salah satu masalah utama yang mencuat. Ketiga aspek ini saling terkait

dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah yang paling rentan terhadap perubahan harga barang dan jasa.

Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Maulana dan Maulana (2024) dalam *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, inflasi tinggi dapat secara signifikan mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan menurun jika harga-harga meningkat tetapi pendapatan masyarakat tidak meningkat secara proporsional. Sebaliknya, inflasi yang moderat dapat menunjukkan permintaan domestik yang sehat dan memberi ruang untuk pertumbuhan ekonomi, selama didukung oleh kebijakan yang tepat dan responsif. Namun, pada tahun 2024, inflasi mencapai titik terendah sebesar 1,57% karena penurunan harga pangan pokok, bukan peningkatan konsumsi masyarakat. Kebijakan pengendalian harga berhasil. Ini menunjukkan tekanan pada daya beli masyarakat masih cukup tinggi.

Sebaliknya, pemerintah terus menggunakan subsidi sebagai instrumen fiskal utama untuk meredam harga dan menjaga daya beli, terutama melalui subsidi energi dan pangan. Namun, kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang dan mengurangi ruang fiskal untuk pembiayaan sektor produktif lainnya. Akibatnya, tugas utama pemerintah pada tahun 2024 adalah memastikan bahwa subsidi didistribusikan secara efektif dan tepat sasaran sambil tetap menjaga keseimbangan fiskal. Koordinasi lintas sektor, peningkatan data penerima manfaat, dan evaluasi berkelanjutan atas keberhasilan kebijakan yang diterapkan adalah semua faktor yang harus mendukung rencana ini.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan kepentingan jangka pendek dan populis. Untuk menjawab persoalan struktural ekonomi nasional, diperlukan tindakan yang direncanakan, terukur, dan strategis. Kebijakan subsidi harus berfungsi sebagai alat pemberdayaan daripada kompensasi; penurunan inflasi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah perubahan, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tuntutan untuk membuat kebijakan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik.

2. METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh kebijakan subsidi dan inflasi di Indonesia terhadap daya beli masyarakat pada tahun 2024. Karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel, jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi dan Ketahanan Pangan

Inflasi tahunan Indonesia pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,3%, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tekanan harga terhadap masyarakat semakin terasa. Kenaikan inflasi ini terutama dipicu oleh meningkatnya harga bahan makanan, khususnya komoditas utama seperti beras, cabai, dan daging ayam. Ketiga komoditas tersebut memiliki peran besar dalam penghitungan inflasi dan secara langsung memengaruhi pengeluaran harian rumah tangga.

Dampak fenomena El Niño, yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakstabilan harga bahan pangan. El Niño menyebabkan gangguan cuaca ekstrim yang mengurangi hasil panen dan memperburuk rantai distribusi logistik, yang bahkan setelah pandemi belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, pasokan komoditas terganggu, harga melonjak, dan masyarakat harus membayar lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Daya beli masyarakat sangat terpengaruh oleh tekanan inflasi ini. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, akan tertekan jika kenaikan harga barang tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan, menurut Maulana dan Maulana (2024). Ini dapat mengurangi realisasi konsumsi dalam jangka pendek dan menghentikan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, penurunan daya beli berisiko meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di mana alokasi konsumsi makanan sangat besar. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, seperti stabilisasi harga makanan, subsidi untuk kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap sumber pendapatan alternatif, dampak inflasi ini dapat menjadi lebih luas dan berkepanjangan.

Tabel 1

Aspek	Data/ Informasi	Sumber Akurat
Inflasi Tahunan (Maret 2024)	3,05% (BPS)	BPS (Berita Resmi Statistik Maret 2024)
Penyumbang Inflasi Utama	Beras, cabai merah, bawang merah	BPS (2024)
Faktor Eksternal	El Niño, distribusi logistik belum pulih	BMKG & BPS (2024)
Dampak terhadap Masyarakat	Penurunan daya beli, konsumsi pangan turun	BPS (2024), Maulana & Maulana (2024)

Sumber : Badan Pusat Statistik. (2024).

Akibatnya, pemerintah harus memprioritaskan strategi untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pangan pokok. Strategi-strategi ini dapat mencakup optimalisasi cadangan pangan nasional, mempercepat distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit, dan meningkatkan program perlindungan sosial. Selain itu, untuk mengatasi masalah jangka menengah dan panjang, sangat penting untuk mendukung sektor pertanian melalui insentif, asuransi pertanian, dan modernisasi alat produksi.

Efektivitas subsidi dan Tantangan Fiskal

Pemerintah terus bergantung pada subsidi energi dan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mempertahankan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Strategi ini telah berkembang menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal untuk mempertahankan stabilitas sosial dan mengurangi efek inflasi. Namun, masalah baru muncul seiring perkembangan ekonomi global.

Biaya subsidi energi meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam laporan APBN 2024, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk subsidi energi meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini pasti berdampak langsung pada beban fiskal negara, yang sekarang semakin berat karena perlu menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Namun, masalah utama bukan hanya berapa banyak subsidi atau bagaimana mereka disalurkan; itu adalah seberapa efektif dan tepat sarasannya. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah ketidaktepatan data penerima manfaat dan kelemahan sistem verifikasi. Kelompok yang paling membutuhkan justru tidak menerima banyak bantuan. Laporan Bank Dunia (2023), yang menyatakan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran cenderung meningkatkan ketimpangan ekonomi dan mengurangi ruang fiskal untuk investasi di bidang produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Karena konsumsi energi yang lebih tinggi, subsidi energi yang menyeluruh atau universal juga berisiko menguntungkan kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu. Di sisi lain, kelompok miskin yang menggunakan energi yang lebih sedikit tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. Akibatnya, metode ini melanggar prinsip keadilan sosial selain menciptakan distorsi dalam struktur konsumsi energi.

Pemerintah diminta untuk terus memperbaiki sistem penargetan dan pendataan bansos dan subsidi sebagai tanggapan atas kritik tersebut. Meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan dapat dicapai melalui penggunaan teknologi digital, integrasi data antar-lembaga, dan verifikasi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Selain itu, reformasi subsidi harus difokuskan untuk menjadi lebih terarah dan terbatas pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Subsidi dan bansos tidak hanya akan berfungsi sebagai alat jangka pendek untuk meredakan gejolak ekonomi, tetapi juga akan berfungsi sebagai fondasi untuk pembangunan ekonomi yang lebih adil dan inklusif jika kebijakan dibuat dengan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 2

Aspek	Data/Informasi	Sumber Akurat
Jenis Subsidi	Subsidi energi (BBM, listrik), Program Keluarga Harapan (PKH), BLT	Kemenkeu (APBN 2024)
Tantangan	Kenaikan harga minyak mentah dunia (Brent > USD 85/barel), pelemahan rupiah > Rp15.800/USD	Kemenkeu (2024)
Permasalahan	Data penerima manfaat tidak mutakhir, banyak inclusion/exclusion error	Bank Dunia (2023), Kemenkeu (2024)
Kritik Institusi	Subsidi universal memperparah ketimpangan dan membebani APBN	Bank Dunia (2023)

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024).

Daya Beli dan Konsumsi Masyarakat

Di beberapa daerah, kenaikan harga kebutuhan pokok masih melampaui kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (2024), kenaikan UMP nasional rata-rata hanya berkisar antara 3–4 persen. Sementara itu, harga beras, salah satu bahan makanan utama, melonjak lebih dari 10 persen pada kuartal pertama tahun 2024. Tekanan besar terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, disebabkan oleh ketimpangan antara pertumbuhan pendapatan dan inflasi harga pangan ini.

Kondisi ini memengaruhi cara masyarakat mengonsumsi makanan. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB nasional, mengalami penurunan. Banyak rumah tangga mulai menurunkan biaya untuk kebutuhan non-esensial seperti rekreasi, pakaian, dan makan di luar rumah. Sebagian besar orang hanya membeli barang atau jasa yang diperlukan untuk hidup sehari-hari.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan sangat rentan, terutama di sektor ritel dan jasa. Industri ini sangat bergantung pada daya beli masyarakat yang stabil dan kuat. Bisnis ritel menghadapi banyak masalah dengan penurunan omset, peningkatan stok yang tidak terjual, dan kemungkinan pemecatan karyawan.

Selain itu, tren ini dapat menghasilkan konsekuensi yang signifikan, termasuk penurunan investasi di sektor konsumsi domestik, penurunan penyerapan tenaga kerja baru, dan kemungkinan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, subsidi pangan, penyesuaian upah yang lebih responsif terhadap inflasi, dan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini.

Tabel 3

Aspek	Data/ Informasi	Sumber Akurat
Kenaikan UMP Nasional Rata-Rata	3,57%	Kementerian Ketenagakerjaan RI (2024)
Kenaikan Harga Beras Nasional	13,45% YoY (Februari 2024)	BPS (2024)
Kontribusi Konsumsi ke PDB	Sekitar 53%	BPS (2024)
Dampak	Penurunan konsumsi non- esensial, belanja menjadi subsisten	BPS & Bank Indonesia (2024)

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024)

Rekomendasi Kebijakan

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, strategi pengendalian harga pangan dan reformasi sistem subsidi adalah langkah penting. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Dengan data yang lebih akurat, subsidi energi dan bantuan sosial dapat diberikan dengan lebih tepat sasaran, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Digitalisasi data, pelibatan pemerintah daerah, dan integrasi dengan NIK adalah komponen penting dalam proses ini.

Selain itu, Bulog dan kementerian teknis harus berperan aktif untuk meningkatkan stabilitas distribusi dan pasokan pangan. Pemerintah harus meningkatkan cadangan pangan strategis dan membangun sistem logistik yang efektif, termasuk infrastruktur distribusi dan penyimpanan digital. Tujuannya adalah untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga

komoditas pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng, terutama pada saat-saat tertentu seperti menjelang hari besar keagamaan atau ketika terjadi gangguan cuaca.

Sebaliknya, pemberdayaan ekonomi akar rumput melalui insentif untuk sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, dan akses pasar yang lebih luas adalah beberapa bentuk dukungan yang dapat ditawarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya mempertahankan bisnis, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Diversifikasi pertumbuhan ekonomi adalah syarat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Sektor investasi, ekspor, dan pengolahan harus meningkatkan kontribusinya untuk mengimbangi ketergantungan konsumsi rumah tangga yang tinggi. Pemerintah harus mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat manufaktur, dan membangun sektor ekonomi baru seperti pariwisata dan digital. Diversifikasi ini akan memberikan peluang pertumbuhan yang lebih merata dan meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap perubahan global.

Kebijakan jangka pendek dan jangka menengah harus bekerja sama agar strategi tersebut berhasil. Bantuan langsung dan pengendalian harga harus disertakan dengan reformasi struktural yang berkelanjutan. Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing di masa depan dengan menerapkan pendekatan yang terpadu dan berfokus pada keadilan sosial.

Tabel 4

Strategi	Tujuan	Implementasi
Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Subsidi dan bantuan sosial lebih tepat sasaran	Integrasi NIK, pemutakhiran rutin berbasis desa/kelurahan
Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan	Menekan volatilitas harga bahan pokok	Optimalisasi cadangan pangan pemerintah, distribusi berbasis zonasi
Insentif UMKM & Sektor Informal	Menjaga ketahanan ekonomi akar rumput	Skema pembiayaan murah, pelatihan digitalisasi usaha
Diversifikasi Ekonomi	Kurangi ketergantungan konsumsi domestik	Penguatan hilirisasi, sektor pariwisata, manufaktur berbasis ekspor

Sumber : Bank Dunia. (2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tidak hanya terfokus pada angka inflasi, melainkan pada dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan efektivitas distribusi subsidi yang masih perlu perbaikan. Meskipun inflasi secara nominal menunjukkan penurunan, pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah, tidak bisa diabaikan. Penurunan harga pangan tertentu memang membantu mengurangi angka inflasi, namun tekanan terhadap daya beli tetap tinggi akibat ketidakberimbangannya antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

Subsidi dan bantuan sosial memang memberikan kontribusi penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi masih banyak tantangan terkait ketidaktepatan sasaran, kelemahan dalam sistem distribusi, serta ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang ada. Untuk itu, perbaikan sistem distribusi subsidi melalui digitalisasi, peningkatan akurasi data penerima manfaat berbasis NIK, serta pelibatan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan keefektifan kebijakan ini.

Selain itu, penting untuk memandang kebijakan ekonomi Indonesia ke depan dari perspektif pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kebijakan subsidi yang ada perlu direformasi agar tidak hanya bertujuan sebagai kompensasi terhadap inflasi, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan membuka peluang usaha, pelatihan keterampilan, serta akses ke pasar dan modal. Pengembangan sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, hilirisasi industri, serta sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Diversifikasi ekonomi Indonesia juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penggerak utama PDB. Pemerintah harus memperkuat sektor ekspor dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam melalui hilirisasi industri, serta mendorong sektor-sektor baru yang berorientasi pada globalisasi dan digitalisasi. Melalui kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi antara jangka pendek dan jangka panjang, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Terutama kepada para akademisi, praktisi, serta instansi pemerintah yang telah menyediakan data dan wawasan penting mengenai dinamika subsidi dan inflasi di tengah ketidakpastian global. Penghargaan kami tujukan kepada keluarga dan rekan sejawat atas motivasi dan masukan yang membangun sepanjang proses penulisan. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan daya beli masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2024). *Laporan Prakiraan El Niño dan Dampaknya di Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: BMKG.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Inflasi Year-on-Year (y-on-y) pada Juli 2024 sebesar 2,13 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,09.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Berita Resmi Statistik Maret 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Laporan Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Nasional Maret 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Dunia. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Securing Future Growth*.
- Bank Dunia. (2023). Subsidy Inefficiencies and Fiscal Risks in Southeast Asia.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia 2024.
- Bisnis.com. (2025, Januari 2). Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah, Ekonom: Waspada Pelemahan Daya Beli Berlanjut.
- Indonesia: Studi Kasus 2020–2024. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 18(1), 22–35. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024*. Jakarta: Kemenaker RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Ringkasan Kenaikan UMP Nasional Tahun 2024. Jakarta: Biro Humas Kemnaker.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita Edisi Triwulan I Tahun 2024. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita Edisi Maret 2024*.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Laporan Evaluasi dan Pemutakhiran Data.
- Maulana, A. W., & Maulana, I. S. (2024). Dinamika Inflasi Di Indonesia Terhadap Daya Beli Masyarakat Pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(2), 20-29.
- Maulana, A., & Maulana, B. (2024). Pengaruh Inflasi dan Subsidi terhadap Daya Beli Masyarakat Indonesia Tahun 2024. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 11(1), 15–32.
- Maulana, A., & Maulana, S. (2024). Dampak Inflasi terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Monitor Indonesia. (2024, Desember 2). *Inflasi Melandai, Ekonom Soroti Kebijakan dan Daya Beli Masyarakat*.
- Perum Bulog. (2024). Strategi Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Jakarta: Perum Bulog.
- Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Nasional. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- The Economics. (2025, Januari 6). Inflasi 2024 Rendah, Sri Mulyani Klaim Pemerintah Tetap Jaga Daya Beli Masyarakat.
- Washington, D.C.: The World Bank Group.
- Washington, D.C.: World Bank Group.